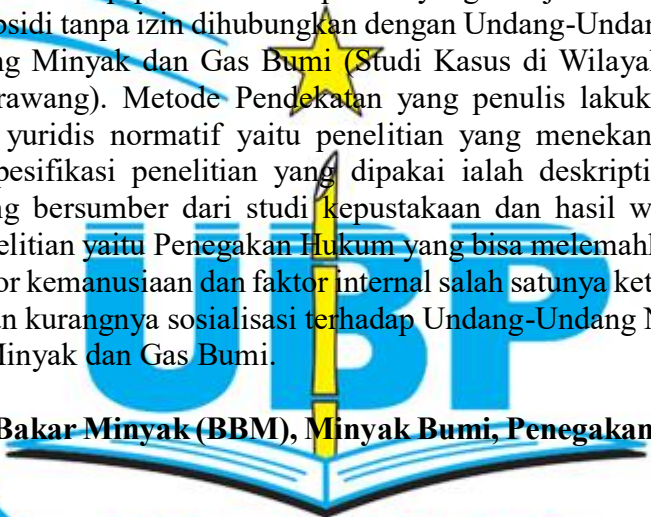


ABSTRAK

Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat khususnya sebagai penunjang dalam kegiatan masyarakat yang bersifat primer maupun sekunder. Penyalahgunaan dengan tanpa izin (ilegal) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) dan apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang). Metode Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dan spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analisis menjelaskan data yang bersumber dari studi kepustakaan dan hasil wawancara (*interview*). Hasil Penelitian yaitu Penegakan Hukum yang bisa melemahkan dari 2 (dua) faktor yaitu faktor kemanusiaan dan faktor internal salah satunya keterbatasan anggota Kepolisian dan kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak (BBM), Minyak Bumi, Penegakan Hukum.



KARAWANG

ABSTRACT

Fuel oil (BBM), especially subsidized fuel, is an important commodity in people's lives, especially as a support in primary and secondary community activities. Abuse without permission (illegal) has a specific intent and purpose to benefit oneself. The problem raised in this study is how the enforcement of criminal law against perpetrators of crimes that sell subsidized fuel oil (BBM) without permission is linked to Law Number 22 of 2001 about Oil and Gas (Case Study in the Legal Area of the Karawang Resort Police).) and what are the obstacles in enforcing criminal law against criminals who sell subsidized fuel oil (BBM) without a permit related to Law Number 22 of 2001 about Oil and Gas (Case Study in the Legal Area of the Karawang Resort Police). Method The approach that the author used in this study was normative juridical, namely research that emphasized legal norms and research specifications used was descriptive analysis explaining data sourced from literature studies and interview results. The results of the research are law enforcement which can weaken 2 (two) factors, namely the human factor and internal factors, one of which is the limited number of police officers and the lack of socialization of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas

Keywords: *Fuel Oil (BBM), Petroleum, Law Enforcement.*

